PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Survey Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat)

Oleh :
Vita Puspa Pratiwi
Wati Aris Astuti,S.E.,M.Si.,Ak.CA

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Komputer Indonesia
E-mail : vitapuspa30@gmail.com

ABSTRACT

Proper government accounting standard application and good understanding regarding region finance accounting by finance developer in Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) will surely improve the quality of finance report. The success of region development cannot be separated from region finance development aspect, well managed by a good management. In an organization, especially government organization, regarding the effort to achieve goals that have been settled cannot be separated from the existence of human resources as the driving force for the organization. The human resources becomes a deciding factor whether a region finance management will work or not besides the infrastructure's availability.

The method used in this research is descriptive and verification with quantitative approach. The data resource in the research is primary data, done by survey method using questionnaire. The analysis method used in it is Structural Equation Modelling (SEM) with Partial Least Square (PLS) approach using SmartPLS 2.0. software.

The result of the research's hypothesis shows that local financial management affect the quality of financial statements local goverment. The quality apparatus affects the quality of financial statements local goverment.

Keywords : Local Financial Management, Quality Apparatus, Financial Statements Local Goverment

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang terjadi di Inspektorat Provinsi Jawa Barat terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu kurangnya ketersediaan server yang dapat mengakibatkan terhambatnya penginputan data dan terlambatnya penyerahan SPJ di Inpektorat Provinsi Jawa Barat (Dadang dan Rini, 2017).

Fenomena yang terkait dengan Kualitas Aparatur di Inspektorat Provinsi Jawa Barat yaitu kurang memahaminya perubahan sistem akuntansi yang awalnya sistem akuntansi berbasis kas kini menjadi berbasis akrual (Dadang dan Rini, 2017).

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Lemahnya Kualitas Laporan Keuangan dikarenakan oleh ketepatan pengumpulan laporan yang tidak tepat waktu
2. Terhambatnya penginputan data dikarenakan kurangnya ketersediaan server dalam perencanaan pengelolaan
3. Menurunnya Kualitas Aparatur disebabkan oleh wawasan dan pengetahuan aparat yang belum memadai.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Seberapa besar pengaruh Kualitas Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan bukti-bukti empiris dilapangan mengenai Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengelolan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kualitas Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan masukan dalam memecahkan masalah yang dialami oleh instansi sektor publik khususnya dalam memecahkan masalah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil Penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu melalui kajiann dan konsep yang diharapkan dapat membuktikan kembali teori-teori penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan kualitias aparatur terhadap kualitas laporan keuangan.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Dwi Ratmono & Mahfud Sholihin (2017:6) Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

"Seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pentausahaaan, pelaporan ,pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah".

2.1.1.2 Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun indikator Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017:6) :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
4. Pengawasan

2.1.2 Kualitas Aparatur

2.1.2.1 Pengertian Kualitas Aparatur

Aparatur pemerintah menurut Dharma Setyawan Salam (2004 : 169) adalah sebagai berikut :

"Pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku"

2.1.2.3 Komponen Aparatur Pemerintah Daerah

Menurut Soeprapto (2010 : 29) Kompnen Aparatur Pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan dan keahlian
2. Wawasan dan pengetahuan
3. Bakat dan potensi
4. Kepribadian dan Motif Kerja
5. Moral dan Etos

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2015:19) menyatakan Laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

"Merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf

24 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan".

2.1.3.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Dwi Ratmono (2017 : 15) adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibanding
4. Dapat dipahami

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Abdul Halim dkk (2010:4) menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan negara dan daerah tidak lepas dari akuntansi sebagai bagian penting untuk pertanggungjawaban yang berbentuk sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan output dari akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik Dalam prosesnya memerlukan suatu sistem akuntansi karena laporan keuangan akan dibuat periodik atau berulang. Oleh sebab itu memahami sistem akuntansi menjadi sangat penting untuk dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

2.2.2 Pengaruh Kualitas Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin (2017 : 1) Pemerintah Daerah adalah Aparatur yang memadai akan menghasilkan dengan laporan keuangan yang baik sehingga dapat mempermudah para pengguna untuk pengambilan keputusan.

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:54), berpendapat bahwa:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah ditanyakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Berdasarkan pada kerangka berpikir diatas maka hipotesis adalah :

H_1 : Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

H_2 : Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif, dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan.

Menurut Sugiyono adalah (2014:147) pengertian metode deskriptif adalah sebagai berikut :

"Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Selanjutnya menurut Sugiyono (2012:55) pengertian metode verifikatif adalah sebagai berikut:

"Metode verifikatif adalah memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel – Variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1) Variabel Bebas/*Independen variable*
   Variabel Bebas pada penelitian ini adalah Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) dan Kualitas Aparatur (X2).
2) Variabel Tidak Bebas/*Dependen variable* Dalam penelitian ini variabel tidak bebas/variabel dependen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah variabel Y adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer
2. Data Sekunder

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:224) mendefinisikan dari teknik pengumpulan data adalah :

"Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data".

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebamyak 24 responden di Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

3.4.2 Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak jumlah populasi yaitu sebanyak 24 responden

Menurut Sugiyono (2014:85) pengertian dari sampling jenuh adalah sebagai berikut:

"Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel".

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis mengadakan penelitian ini pada Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Barat Jl. Surapati No.4, Citarum, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat 4015. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari Oktober 2017 sampai dengan Januari 2018.

3.5 Metode Pengujian Data

Penulis menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data. Untuk menilai kuesioner apakah valid dan realibel maka perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

3.6 Metode Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif.

3.6.1 Analisis Data Metode Deskriptif

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan kualitas aparatur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Umi Narimawati (2012:245) langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian deskriptif adalah sebagai berikut :

a. Indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban.
b. Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.
c. Dihitung skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor
d. Untuk mendeskripsikan jawaban responden juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik.
e. Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan rentang kriteria sebagai berikut :

$$\%\ skor\ aktual = \frac{Skor\ aktual}{Skor\ ideal} x100\%$$

Sumber: Umi Narimawati,2010:245

3.6.2 Analisis Data Metode Verifikatif

Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat dikukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran

(*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

3.7 Uji Hipotesis

Menurut Suharyadi dan Purwanto S.K. (2011:112) pengujian hipotesis definisikan sebagai berikut:

"Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak".

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 457 (63.47%) berada di antara interval 52%-68%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pengelolaan Keuangan Daerah berada dalam kategori cukup , hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1.1.2 Kualitas Aparatur

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel sistem Kualitas Aparatur sebesar 435 (60.42%) berada di antara interval 52%-68%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Aparatur berada dalam kategori cukup, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kualitas Aparatur.

4.1.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 547 (65.12%) berada di antara interval 52%-68%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berada dalam kategori cukup, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat Kelemahan dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.1.2 Analisis Verifikatif

1. Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

A. Uji Validitas

a. Convergent Validity

Nilai *outer loading* untuk setiap indikator dari Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas Aparatur dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, memiliki nilai > 0,7 yang berarti bahwa semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang baik dalam menjelaskan variabel latennya.

b. Discriminant Validity

Nilai *cross loading* memiliki korelasi setiap konstruk laten untuk indikator yang bersesuaian lebih tinggi dari pada konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten telah memenuhi syarat.

B. Uji Realibilitas

Nilai *Composite Reliability* (CR) setiap variabel laten melebihi 0,7 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013) sehingga model dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi.

C. Evaluasi *Fit Test Of Combination Model* (Seluruh Model)

Nilai *Goodness of Fit* (GoF) yang didapat dari hasil perkalian dari nilai *communality* dan *R-square* sebesar 0,749. Nilai GoF sebesar 0,8132 menurut Uce Indahyanti, 2013 tergolong substansial atau tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji kecocokan model *goodness of fit* sudah tergolong tinggi.

2. Pengujian Model Struktural *(Inner Model)*

Nilai koefisien yang dipeloeh jalur struktural X_1 terhadap Y sebesar 0,447 dan koefisien jalur struktural X_2 terhadap Y sebesar 0,454.

Berdasarkan presentase pengaruh dari setiap variabel adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan kontribusi pengaruh sebesar 37.1% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Kualitas Aparatur memberikan kontribusi pengaruh sebesar 37.8% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Pada tabel di atas, terlihat nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0.749 atau 74.9%. Hasil tersebut menunjukan bahwa Pengelolaan keuangan daerah (X_1) dan Kualitas Aparatur (X_2) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 74.9 % terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Y), sedangkan sebanyak (1-*R Square*) 25.4% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti (ζ) seperti (masukin variable lain yang bisa mempengaruhi Kualitas Lap Keuangan)

3 . Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel laten eksogen tersebut signifikan atau tidaknya maka dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :

a) Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) (Hipotesis 1)

Tabel 4.1
Uji *t* Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	t_{hitung}	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X1 -> Y	0.448	6.045	2.079	Ho ditolak	Signifikan

b) Pengaruh Kualitas Aparatur (X_2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) (Hipotesis 2)

Tabel 4.2
Uji *t* Kualitas Aparatur (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	t_{hitung}	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X2 -> Y	0.455	5.825	2.079	Ho ditolak	Signifikan

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini pengelolaan keuangan daerah (X1) berpengaruh sebesar 37.8% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,830 yang berarti pengelolaan keuangan daerah memberikan pengaruh yang tinggi dengan arah positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Sehingga dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 37.8% terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah, sedangkan sisanya 62.2%.

Fenomena yang terjadi di Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah kurang terlaksana dengan baik proses penyerahan Surat Pertanggungjawaban dan ketersediaan server di Inspektorat Provinsi Jawa Barat hal tersebut dikarenakan keterlambatan penyerahan SPJ dari BPP ke Inspektorat dan masih kurangnya ketersediaan server yang dapat menghambat penginputan data yang dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dibidang IT. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang ditemukan di lapangan yaitu membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 62.73% dan termasuk cukup, namun ada *gap* sebesar 37.27% yang artinya pengelolaan keuangan daerah masih terdapat kelemahan.

Hal tersebut didukung oleh teori yang di sebutkan oleh Abdul Halim dkk (2010:4) menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan negara dan daerah tidak lepas dari akuntansi sebagai bagian penting untuk pertanggungjawaban yang berbentuk sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan output dari akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam prosesnya memerlukan suatu sistem akuntansi karena laporan keuangan akan dibuat periodik atau berulang. Oleh sebab itu memahami sistem akuntansi menjadi sangat penting untuk dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

4.2.2 Pengaruh Kualitas Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini Kualitas Aparatur (X2) berpengaruh sebesar 37.1% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,829 yang berarti Kualitas Aparatur memberikan pengaruh yang tinggi dengan arah positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah inspektorat provinsi jawa barat. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Kualitas Aparatur memberikan pengaruh sebesar 37.1% terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah, sedangkan sisanya 62.9%

Fenomena yang terjadi pada variabel bahwa Kualitas Aparatur dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terjadi pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat terdapat masalah yaitu wawasan dan pengetahuan aparat yang belum memadai dalam perubahan sistem akuntansi yang awalnya berbasis kas kini berubah menjadi berbasis akrual. Seperti yang dilakukan pada penelitian ini membuktikan bahwa Kualitas Aparatur mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 60.42% dan termasuk cukup, namun ada *gap* sebesar 39.58% yang artinya Kualitas Aparatur masih terdapat kelemahan.

Hal tersebut didukung oleh teori yang di sebutkan oleh Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin (2017 : 1) Pemerintah Daerah adalah Aparatur yang memadai akan menghasilkan dengan laporan keuangan yang baik sehingga dapat mempermudah para pengguna untuk pengambilan keputusan.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat hubungan antara Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan keuangan pemerintah Daerah, hal tersebut menunjukan hubungan yang tinggi dan bertanda positif, artinya apabila Pengelolaan Keuangan Daerah semakin baik maka Kualitas Laporan keuangan pemerintah Daerah akan semakin baik.

2. Kualitas Aparatur Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan pemerintah Daerah terdapat hubungan antara Kualitas Aparatur terhadap Kualitas Laporan keuangan pemerintah Daerah, hal tersebut menunjukan hubungan yang tinggi dan bertanda positif, artinya apabila Kualitas Aparatur semakin baik maka Kualitas Laporan keuangan pemerintah Daerah akan semakin baik.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

1. Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, diketahui bahwa indikator perencanaan dan pertanggungjawaban merupakan kelemahan yang harus dibenahi oleh pihak Inspektorat Provinsi Jawa Barat yaitu meningkatkan ketersediaan server sehingga dapat mempercepat waktu penginputan data dan lebih diperhatikan waktu pengumpulan surat pertanggungjawabannya dari BPP dan bendahara ke Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan cara melakukan konfirmasiss kepada pihak yang bersangkutan untuk penyampaian pertanggungjawaban sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Dalam Kualitas Aparatur, diketahui bahwa indikator wawasan dan pengetahuan memiliki kelemahan yang harus dibenahi, yaitu dengan cara mengikuti Bimtek atau diklat yang dilakukan oleh instansi agar menambah pengetahuan dan dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai yang telah di tetapkan.
3. Untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu mengenai ketepatan waktu yang termasuk dalam indikator Relevan yang memiliki kelemahan dan harus dibenahi, yaitu dengan cara lebih diperhatikannya terkait penyerahan Surat Pertanggungjawaban bukti

penggunaan dana yang telah dilakukan dan menambah server untuk dapat menginput data yang lebih banyak lagi agar mempercepat proses penyerahan laporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

5.2.2 Saran Akademik

1. Bagi Pengembang Ilmu disarankan pada penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan metode yang sama tetapi unit analisis dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum.
2. Bagi Peneliti Lain selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel yang memiliki hubungan yang cukup erat untuk berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, seperti menambahkan variabel intervening ataupun variabel moderating untuk memperoleh hasil yang berbeda. Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur dapat dijadikan rekomendasi untuk ditambahkan pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Dharma. Surya. 2004. *Manajemen Kinerja*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Dwi Ratmono dkk. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual.Edisi 2*. Penerbit UPP STIM YKPN.Yogyakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods*). Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).* Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.

Suharyadi dan Purwanto S.K. 2011. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.